

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan dan dioperasikan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi *stakeholders*, salah satunya pemegang saham. Keuntungan dan kemakmuran pemegang saham perusahaan akan tercapai jika nilai perusahaan meningkat, salah satunya dengan harga saham perusahaan tinggi. Harga saham yang tinggi menjadi sinyal bagi investor selaku pemegang saham untuk berinvestasi ke perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan sudah menjadi tuntutan agar perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang profesional untuk ditempatkan dalam posisi ahli seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan manajer untuk menjalankan tata kelola perusahaan. Pemilik perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang ahli dan profesional memiliki harapan agar perusahaannya mampu bersaing secara kompetitif guna mengambil bagian proporsi yang besar di dalam pasar dan mampu bertahan menghadapi tantangan persaingan yang semakin kompetitif.

Dalam menjalankan suatu perusahaan, sering kali terjadi konflik antara pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang menanamkan modalnya di perusahaan dengan pihak manajemen yang mengoperasikan perusahaan. Sebagaimana menurut Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan adanya potensi konflik keagenan karena kepemilikan di dalam operasional perusahaan.

Dalam konsep teori keagenan (*agency theory*) yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976), manajer sebagai agen seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan prinsipal yaitu pemegang saham. Akan tetapi pada kenyataannya, manajer dapat melakukan tindakan-tindakan yang hanya memaksimalkan kepentingannya sendiri. Agen bisa melakukan tindakan yang tidak menguntungkan pemegang saham selaku prinsipal secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan dari perusahaan tersebut.

Dari kondisi konflik agensi tersebut maka terjadilah pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus operasional perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer yang merupakan pengelola perusahaan bisa saja tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interests*). Kewenangan yang leluasa dalam pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Manajemen sebagai pengelola perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingannya atas biaya pemilik perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (*asymmetric information*).

Pujiati (2015) menyatakan bahwa perilaku manajer dapat diawasi oleh pemegang saham dengan mengeluarkan *agency cost*. Kepemilikan manajerial

dipandang dapat mengurangi *agency cost* apabila porsinya dalam struktur kepemilikan perusahaan ditingkatkan. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Keterlibatan manajer tersebut mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena mereka akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Sehingga kebijakan dividen perusahaan pun dapat selaras dengan kepentingan pemegang saham yang menginginkan pengembalian investasi mereka dalam bentuk dividen dengan nilai yang tinggi.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajer perusahaan. Dengan adanya pembagian proporsi saham kepada pihak manajer, pemegang saham berharap tindakan manajer dapat selaras dengan kepentingan saham. Konflik keagenan juga terjadi tidak hanya antara pemegang saham dengan manajemen, namun konflik keagenan juga terjadi antara pemegang saham mayoritas (pengendali) dengan pemegang saham minoritas (non-pengendali).

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi akan

menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer, seperti manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Selain itu, pengawasan yang efektif dari investor institusional akan memaksa manajer untuk mendistribusikan arus kas sebagai dividen. Dividen dapat digunakan sebagai kompensasi investor institusional atas kegiatan pengawasan mereka terhadap manajerial perusahaan.

Setiap investor pasti mengharapkan pertumbuhan perusahaan agar dapat memperoleh pengembalian seperti yang diinginkan atas partisipasinya dalam bentuk penyertaan saham. Di sisi lain, pihak manajemen akan membatasi arus kas keluar berupa dividen kas yang berjumlah terlalu besar dengan alasan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, menambah investasi, maupun melunasi utang. Terlebih jika kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik, maka pihak manajemen akan cenderung memilih investasi baru daripada membayar dividen bagi pemegang saham dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar investasi yang dikeluarkan pada periode tertentu maka semakin kecil dividen yang akan dibayarkan.

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan

pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer termasuk dalam kebijakan dividen. Yuli *et al* (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, pemerintah daerah, bahkan negara atau institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen. Dengan adanya *monitoring* tersebut maka pemegang saham semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Pentingnya peran kepemilikan institusional yang mampu memonitor kinerja manajemen perusahaan, mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku manajer yang oportunistik yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Novian (2016) investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.

3. Investor insitusal secara umum memiliki relasi bisnis yang kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Industri perbankan merupakan industri dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang terbilang sangat ketat di Bursa Efek Indonesia. Mayoritas penelitian sebelumnya seperti Jahanzeb *et al.* (2016) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen perusahaan jual beli, Tahir *et al* (2016) menemukan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen perusahaan industri tekstil di Pakistan, Pujiati (2015) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen di industri barang konsumsi dengan hasil kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan industri barang konsumsi, dan juga Sumartha (2016) menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap perusahaan manufaktur. Dari ulasan penelitian sebelumnya tersebut, mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Keputusan apakah laba dividen dibagikan kepada para pemegang saham atau ditahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi indikasi pengaruh struktur kepemilikan dalam perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan manajer perusahaan terhadap kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2016. Penelitian ini juga menguji pengaruh variabel lain yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan yang dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk mendukung korelasi antara struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah penentuan populasi penelitian ini pada perusahaan sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri perbankan dikenal ketat dalam tata kelola manajemen perusahaan, sehingga menarik minat peneliti untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh tiap-tiap variabel terhadap kebijakan dividen yang akan diujikan pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2016.

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian: Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan industri perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?
2. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan industri perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen dalam sebuah perusahaan di industri perbankan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan dividen yang tepat dan akurat sesuai mekanisme *Good Corporate Governance*.

3. Bagi calon investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor untuk menentukan kebijakan berinvestasinya dengan mempertimbangkan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan yang akan dituju untuk berinvestasi.